

## Analisis Peran Gereja Sebagai Penyelenggara Keadilan Sosial Dalam Konteks Bangsa Indonesia

**Harold Pardede**

STT Moriah Tangerang  
E-mail: harold@moriah.ac.id

---

**Article History:**

Received: 01 Januari 2022

Revised: 10 Januari 2022

Accepted: 11 Januari 2022

**Kata Kunci:** Gereja, Sosial,  
Keadilan, Pancasila,  
Indonesia

***Abstrak:** Gereja harus menjadi alat bantu Negara untuk menciptakan keadilan sosial sesuai dengan perspektif Sila Kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial dalam perspektif Sila Kelima Pancasila adalah keadilan politik dan keadilan ekonomi. Sama rata sama rasa berdasarkan konstitusi dan sama rata – sama rasa dalam lapangan ekonomi. Artinya keadilan sosial yang dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong serta semua untuk semua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen dan observasi. Pada penelitian ini dimaksudkan agar Gereja mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat namun belum tercermin dan terlaksana dalam program – program. Kenyataannya banyak Gereja di Indonesia belum mengarah pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebanyakan Gereja di Indonesia masih bersifat eksklusif serta belum banyak memikirkan masyarakat di luar gereja.*

---

### PENDAHULUAN

Masyarakat adil dan makmur adalah tujuan akhir dari revolusi Indonesia. Masyarakat adil dan makmur, cita – cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkorban berpuluh – puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur tujuan akhir dari revolusi kita. Masyarakat adil dan makmur yang untuk itu, berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita menderita. Perpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita meringkuk dalam penjara. Perpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita meninggalkan kebahagiaan hidupnya. Beratus-ratus ribu, mungkin jutaan rakyat kita menderita tak lain tak bukan ialah mengejar cita-cita terselenggaranya satu masyarakat adil dan makmur yang di situ segenap manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengesap kebahagiaan. Ide dan mimpi tentang kesejahteraan sosial ini kemudian dirumuskan sebagai salah satu unsur yang menyusun dasar falsafah Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila Sila Kelima yang berbunyi, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ seterusnya mewarnai konstitusi Negara Indonesia. Meski visi tentang keadilan sosial telah lama bergelora dan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia bahkan telah termuat dengan rinci dalam konstitusi negara namun belum terwujud dengan baik. Kenyataannya, kesejahteraan sosial belum terwujud untuk semua dan kesenjangan ekonomi masih terjadi dalam masyarakat kita.

Melihat hal ini gereja-gereja di Indonesia sebagai komponen yang tak terpisahkan dari

---

Negara harus menyadari bahwa kesejahteraan Indonesia juga adalah kesejahteraan gereja. Seperti ungkapan Yeremia 29:7, "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu". Berdasarkan hal ini, Gereja harus ikut berpartisipasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti termaktub dalam Sila Kelima Pancasila dan UUD 1945. Karena masih banyak Gereja di Indonesia belum melakukan misi yang sesuai dengan perspektif Keadilan Sosial yang tertulis dalam sila kelima Pancasila. Menurut Ir Soekarno keadilan sosial berdasarkan sila kelima Pancasila adalah keadilan ekonomi dan keadilan politik.

## METODE PENELITIAN

Dalam analisis atau penelitian ini tentu peneliti menggunakan metode kualitatif. Analisis dalam data kualitatif yaitu: dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, dan jurnal penelitian yang difokuskan pada topik metode penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran atau kaitan Gereja dengan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam studi literatur, peneliti menelaah secara kritis berbagai teori dan referensi yang terkait dengan topik yang diteliti melalui buku dan berbagai dokumen. Buku-buku yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini adalah berbagai buku mengenai keadilan seperti teori-teori dari Max Weber, Emil Durkheim dan Karl Marx. Selain itu akan dikutip berbagai pandangan atau pendapat dari pakar atau pengamat Negara seperti Yudi Latif dan tokoh nasional lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kehidupan Sosial Menurut Max Weber

Paparan Weber dalam sosiologi adalah telaah tentang akal budi (rasio). Menurut Weber bentuk "*rationale*" meliputi "*means*" (alat) yang menjadi sasaran utama dan "*ends*" meliputi aspek budaya. Orang rasional, menurut Weber akan memilih alat yang paling benar untuk mencapai tujuannya. Weber membedakan rasionalitas ke dalam empat model, yakni rasionalitas tradisional (nalar yang mengutamakan acuan perilaku berdasarkan tradisi kehidupan masyarakat), beranjak ke rasionalitas nilai (adanya kesadaran akan perlunya nilai sebagai pedoman), rasionalitas afektif (hubungan emosi yang mendalam: contohnya adalah hubungan suami-istri, ibu-anak dan lain sebagainya), dan rasionalitas Instrumental (pilihan rasional sehubungan dengan tujuan dan alat) Weber menegaskan bahwa karakteristik ajaran protestan mendukung masyarakat melakukan perubahan dengan melihat kerja sebagai panggilan hidup. Bekerja tidak sekedar memenuhi keperluan hidup, tetapi juga tugas suci. Bekerja adalah juga pensucian sebagai kegiatan agama yang menjamin kepastian akan keselamatan, orang yang tidak bekerja adalah mengingkari sikap hidup agama dan melarikan diri dari agama. Weber juga menghubungkan perubahan sosial dengan birokrasi. Birokrasi merupakan agen perubahan sosial. Birokrasi berasal dari dua kata (*bureau + cracy*). *Bureau* adalah kantor yang menjadi alat dari manusia dalam hal ini adalah seperangkat peran yang menghasilkan basis kekuasaan dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang baku. *Cracy* adalah kekuatan yang kemudian menghasilkan kewibawaan. Birokrasi bagi Weber merupakan hasil dari tradisi rasional masyarakat barat yang dicerminkan ke dalam lembaga kerja untuk mengurus segala keperluan teknis guna memudahkan pelayanan kepada publik atau konsumen.

.....

Melalui pandangan Webber seharusnya Gereja sebagai suatu sistem atau lembaga harus mampu bekerjasama dengan sistem birokrasi pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial. Menurut Webber, Gereja dan orang-orang Kristen harus mampu menciptakan perubahan sosial atau lingkungan hidupnya. Oleh karena itu Gereja harus melakukan misinya turun ke lapangan untuk melihat berbagai macam persoalan di Bangsa Indonesia ini. Gereja harus mampu memberikan sumbangsih untuk meringankan beban pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Sebagai contoh, Gereja dapat melakukan bakti sosial, memberikan program gratis yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan suasana yang rukun dengan lembaga pemerintah di sekitarnya. Gereja Indonesia harus mampu saling bekerjasama untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, meningkatkan perekonomian bangsa, memberikan pendidikan dan kesehatan yang gratis bagi yang membutuhkan. Hal-hal seperti ini adalah pelayanan publik yang bisa dilakukan oleh Gereja dan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial.

### **Keadilan Sosial Menurut Karl Marx**

Dinamika perubahan sosial menurut Marx mengacu pada konsep materialisme bahwa sejarah perubahan dan perkembangan manusia selalu berlandaskan pada kondisi sejarah kehidupan material. Sejarah perkembangan masyarakat menurut Marx berangkat dari masyarakat primitif tanpa kelas, disusul oleh masyarakat feodalis, dimana kapitalisme dalam tahap awal sudah mulai nampak. Kemudian masyarakat akan beranjak menuju masyarakat dalam proses pembentukannya. Karl Marx mengenali hakikat manusia dalam mewujudkan kebenaran dan kesucian dengan memperjuangkan nilai-nilai hakiki manusia dalam tatanan kehidupan.

Sosialisme menurut Karl Marx menyatakan bahwa kekayaan dunia ini merupakan milik semua, dan bahwa pemilikan bersama lebih baik daripada milik pribadi. Dikatakan lebih baik, karena prinsip ini meniadakan perbedaan kaya-miskin, borjuis-buruh, dan pemodal pekerja. Sosialisme membatasi hasrat untuk mengejar keuntungan pribadi, sehingga kepentingan pribadi yang menjadi sumber keburukan, iri hati, dan bahkan perang, dapat ditiadakan karena semua orang bersaudara. Marx mengatakan bahwa di dalam persaudaraan, semua orang mendapatkan yang sama-tidak ada yang memiliki secara berlebihan dan tidak ada yang menderita kekurangan. Marx menganalisis ketegangan ekonomi, terutama dalam hubungan produksi, yakni pertentangan kepentingan antara kaum buruh (kelas bawah) dan kaum borjuis (kelas atas). Menurut Marx, ketegangan dipicu oleh perkembangan kepemilikan alat-alat produksi. Marx menambahkan bahwa liberalisme membuka jalan bagi tiap-tiap orang untuk mengembangkan kebebasannya mendirikan pabrik-pabrik dan membeli mesin-mesin. Alat-alat produksi kemudian jatuh ke tangan individu-individu (kapitalis) dan menjadi milik pribadi mereka. Selanjutnya, mereka menggunakan tenaga-tenaga buruh untuk menjalankan mesin-mesin tersebut dan untuk melipatgandakan produksi. Marx mengatakan, dalam proses produksi, tenaga kerja (buruh) yang telah dibeli merupakan bagian dari kapital, karena selama bekerja si pekerja menambahkan nilai-nilai pada alat produksi yang ia transformasi menjadi sebuah produk dengan mengeluarkan tenaga kerjanya. Di tangan kapitalis yang telah membelinya, si pekerja merupakan suatu daya yang memproduksi nilai.

Melalui teori sosial Karl Marx, Gereja juga dapat menjalankan perannya untuk menciptakan keadilan masyarakat Indonesia. Sesuai juga dengan ajaran Tuhan Yesus untuk selalu memberi, bahkan memberi dari kekurangan (Lukas 21:4). Melalui teori Karl Marx yang mengatakan “kepemilikan bersama lebih baik dari kepemilikan pribadi” mengingatkan orang-orang Kristen dan Gereja khususnya kepada pola hidup Gereja mula-mula. Adanya kebersamaan untuk saling tolong-menolong, tidak memandang status sosial kaya atau miskin, hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk saling berbagi, saling mengasihi untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab juga mengatakan “Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar

---

biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.” (Amsal 11:24-25). Tentu bukan berarti segala harta jemaat harus dibagi rata untuk diberikan kepada setiap orang miskin, melainkan Gereja sebagai sebuah sistem dan lembaga harus mampu mengakomodasi setiap umatnya untuk turut serta dalam pelayanan public dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila sila kelima Bangsa Indonesia.

### **Keadilan Sosial Menurut Emile Durkheim**

Durkheim merintis konsepsi tentang keteraturan sosial. Terdapat kekhawatiran Durkheim dalam melihat ketidakpastian dan kekacauan masyarakat barat pasca revolusi. Akibat revolusi industri yang berlangsung di Inggris dan daratan Eropa., mengakibatkan perubahan sosial yang sangat cepat dan meminta banyak korban. Emile Durkheim merisaukan keadaan itu terutama yang terjadi di Perancis. Perubahan yang terlalu cepat dan radikal akan membawa akibat dan ancaman terhadap tatanan sosial. Untuk mengatasi dampak perubahan yang sangat cepat itu ia menawarkan kajian sosiologi perubahan sosial yang merupakan hasil rekayasa dan perubahan sosial yang stabil. Pemikiran Durkheim adalah menggunakan pendekatan system. Masyarakat diibaratkan seperti organisme hidup, yang dapat dianalisis dengan penjelasan sebuah struktur yang saling berfungsi. Dalam hal ini organism hidup maksudnya makhluk hidup seperti juga manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki organisme hidup dalam satu tatanan sistem, masing-masing organ akan memiliki fungsi sendiri-sendiri dan tidak dapat dioisahkan satu sama lain. Jika satu organ tidak berfungsi maka akan membuat organ lain macet atau terganggu.

Perubahan sosial merupakan kondisi abnormal karena disinyalir mencerminkan goyahnya keseimbangan unsur di dalam sistem sosial. Oleh karena itu, unsur-unsur di dalam sistem perlu mengupayakan : (1) equilibrium atau keseimbangan, yaitu suatu keadaan dimana diutamakan terjadinya keseimbangan kekuatan sehingga tidak terjadi perubahan sosial yang mengarah pada penghancuran sistem yang ada, (2) Faktor eksternal, yakni faktor-faktor di luar sistem yang diproyeksikan selalu menjadi penyebab utama proses perubahan sosial, (3) konsensus, yaitu proses pencapaian kesepakatan sosial dari orang-orang atau lembaga yang terlibat dalam konflik sosial. Emile Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi menjadi penting dan kemudian diujinya melalui studi empiris. Secara singkat, Pokok bahasan dari sosiologi adalah studi atas fakta sosial. Fakta sosial didefinisikan sebagai: Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal; atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual. Asumsi dasar dari pendefinisian Durkheim tersebut adalah bahwa gejala sosial itu riil dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya. Gejala sosial (seperti aturan legal, beban moral, bahasa dan konsensus sosial) sebagai sesuatu yang riil/faktual, maka gejala-gejala tersebut dapat dipelajari dengan metode-metode empirik. Oleh sebab itu, dimungkinkan untuk dikembangkannya metode keilmuan dengan gejala/fakta sosial sebagai objek material ilmu tersebut, yaitu ilmu sosiologi.

Durkheim juga menekankan mengenai sifat kudus yang bersifat sosiologis bukan teologis. Sifat kudus itu dapat diartikan bahwa sesuatu yang "kudus" itu "dikelilingi oleh ketentuan-ketentuan tata cara keagamaan dan larangan-larangan, yang memaksakan pemisahan radikal dari yang duniawi." Sifat kudus ini dibayangkan sebagai suatu kesatuan yang berada di atas segala-galanya. Durkheim menyambungkan lahirnya pengkudusan ini dengan perkembangan masyarakat, dan hal ini akan dibahas nanti. Hubungan antara agama dengan masyarakat juga terlihat di dalam masalah ritual. Kesatuan masyarakat pada masyarakat tradisional itu sangat tergantung kepada

.....

conscience collective (hati nurani kolektif), dan agama nampak memainkan peran ini. Masyarakat menjadi "masyarakat" karena fakta bahwa para anggotanya taat kepada kepercayaan dan pendapat bersama. Ritual, yang terwujud dalam pengumpulan orang dalam upacara keagamaan, menekankan lagi kepercayaan mereka atas orde moral yang ada, di atas mana solidaritas mekanis itu bergantung. Di sini agama nampak sebagai alat integrasi masyarakat, dan praktek ritual secara terus menerus menekankan ketaatan manusia terhadap agama, yang dengan begitu turut serta di dalam memainkan fungsi penguatan solidaritas. Agama juga memiliki sifatnya yang historis. Menurut Durkheim totemisme adalah agama yang paling tua yang di kemudian hari menjadi sumber dari bentuk-bentuk agama lainnya. Seperti misalnya konsep kekuatan kekudusan pada totem itu jugalah yang di kemudian hari berkembang menjadi konsep dewa-dewa, dsb. Kemudian perubahan-perubahan sosial di masyarakat juga dapat merubah bentuk-bentuk gagasan di dalam sistem-sistem kepercayaan. Ini terlihat dalam transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, di mana diikuti perubahan dari "agama" ke moralitas rasional individual, yang memiliki ciri-ciri dan memainkan peran yang sama seperti agama.

Melalui pemahaman Durkheim ini, Gereja harusnya memiliki kepekaan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat sekitarnya yang dalam konteks ini adalah Bangsa Indonesia. Jangan sampai Gereja hanya terjebak di dalam ritual keagamaan tanpa menjunjung nilai sosial dan keadilan yang ada di Negeranya sendiri. Gereja dan Pemerintah memang memiliki sistem dan lingkungan masing masing yang tidak bisa dicampuraduk, akan tetapi Gereja harus aktif serta di dalam ideologi dan falsafah bangsa tersebut yang dimana salah satunya sesuai sila kelima adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gereja tidak bisa memisahkan diri dengan sembunyi di arti kudus tanpa memiliki kepekaan dengan masyarakat dan agama agama lain yang ada di Indonesia. Inilah yang menjadi tugas Gereja yang harus memiliki nurani untuk tetap aktif di dalam misinya yaitu pelayanan public dengan memperhatikan kesejahteraan sosial bukan saja para umatNya melainkan juga masyarakat yang membutuhkan di Bangsa Indonesia ini.

### **Peran/Misi Gereja Membawa Keadilan Sosial Di Indonesia**

Misi berasal dari kata Latin 'missio' yang berarti perutusan. Kata mission adalah bentuk substantif dari kata kerja mittere (mitto, missi, missum) yang mempunyai beberapa pengertian dasar; (a) Membuang, menembak, membentur, (b) mengutus, mengirim; (c) membiarkan, membiarkan pergi, melepaskan pergi; (d) mengambil/menyadap, membiarkan mengalir (darah). Kalangan gereja pada dasarnya menggunakan kata mittere dalam pengertian mengutus, mengirim. Orang yang diutus atau misionaris diterjemahkan dari kata Yunani apostolos yang terdapat 79 kali dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, sedangkan tugas yang mereka laksanakan disebut mission sebagai terjemahan dari kata Yunani apostole. Dalam penggunaan selanjutnya istilah mission dan apostole yang pada dasarnya mempunyai arti yang sama mendapatkan modifikasi pengertian seperti dalam istilah missionalis apostolus (kerasulan misioner) yang dipakai oleh Paus Pius XII dalam ensiklik misi Fidei Donum (1957). Kata apostole atau kerasulan dipakai untuk menunjuk kegiatan pastoral umum, sedangkan misi atau perutusan dipakai untuk kegiatan penyebaran iman.

David J Bosch memaknai misi sebagai hal yang mengungkapkan hubungan yang dinamis antara Allah dan dunia. Bosch juga memaknai misi sebagai ciri keberadaan Kristen. Baginya misi adalah pernyataan diri Allah sebagai Dia yang mengasihi dunia, keterlibatanNya di dalam dan dengan dunia, sifat dan inisiatif-Nya yang merangkul gereja dan dunia. di mana gereja mendapatkan kesempatan istimewa untuk ikut serta di dalamnya. Misi terutama mengacu pada misi Allah (Mission Dei) yang memberitakan kabar baik bahwa Allah adalah Allah untuk manusia. Misi juga berarti jawaban 'ya' Allah kepada dunia, misi merupakan partisipasi di dalam keberadaan Allah di dalam dunia. Misi mencakup penginjilan sebagai salah satu dimensi yang esensial yaitu

---

---

pemberitaan keselamatan di dalam Kristus kepada mereka yang tidak percaya kepadanya, memanggil mereka untuk bertobat dan meninggalkan hidup yang lama, memberitakan pengampunan dosa serta mengundang mereka untuk menjadi anggota-anggota yang hidup dari komunitas Kristus di bumi untuk memulai kehidupan pelayanan kepada orang lain di dalam kuasa Roh Kudus. Kaum evangelikal senantiasa membendung pengaruh liberalisme dalam lingkungan kehidupan gereja, khususnya metode penelitian Alkitab secara ilmiah yakni metode kritis historis. Kaum evangelikal selalu mempertahankan semangat misioner bagi evangelisasi dunia seperti yang terjadi pada abad-abad sebelumnya. Kaum evangelikal selalu menjawab dari sudut pandang mereka tentang masalah-masalah yang diakibatkan oleh modernisme, kebangkitan agama-agama non Kristen dan pluralitas kebudayaan. Gereja-gereja dari kalangan evangelikal agak berorientasi ke belakang. Mereka tidak seperti kalangan ekumenikal yang berani mengembangkan teologi, misi dan identitas yang dinamis seiring dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang tidak pernah berhenti berkembang. Gereja – gereja Protestan ekumenikal dari masa ke masa mengalami perubahan-perubahan dalam memahami misi sesuai dengan konteks zaman. Hal ini tampak dalam beberapa konferensi yang diselenggarakan. Pertama, dalam konferensi Edinburgh Skotlandia yang berlangsung pada tahun 1910 menyepakati bahwa lapangan misi tidak boleh lagi dibatasi hanya pada Asia dan Afrika saja, namun seluruh dunia. Misi bukan cuma tugas gereja – gereja Barat tetapi tugas semua gereja di seluruh dunia. Kedua konferensi Yerusalem yang berlangsung pada 1928 yang merupakan kelanjutan dari konferensi Edinburgh menyepakati bahwa pemahaman tentang misi tidak lagi sebagai usaha mengkristenkan dunia non barat, melainkan sebagai tugas bersama dalam menjawab masalah – masalah dunia ini, khususnya tantangan sekularisme, ateisme, komunisme dan masalah hubungan dengan agama Yahudi dan Islam. Dalam konferensi Yerusalem gereja-gereja Protestan dari kalangan ekumenikal melihat misi dalam wawasan keterbukaan agama Kristen terhadap perkembangan zaman. Ketiga dalam konferensi Tamboran di India Tahun 1938 dengan tema, ‘World Mission of the Church’ memaknai misi sebagai panggilan gereja di seluruh dunia dan menetapkan ‘Amanat Agung’ sebagai misi holistik berupa keselamatan pribadi dan perwujudan keadilan, kemerdekaan serta perdamaian.

Misi Gereja baik dalam berbangsa dan bernegara harus dilandaskan dari Firman Tuhan yang berbunyi, yang berbunyi, ‘Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang (Lukas 4:18,19). Gereja harus berpandangan bahwa Injil atau Kabar Baik itu adalah saat orang atau pribadi, persoalan atau pergumulan-pergumulannya diselesaikan. Saat mereka lapar mereka membutuhkan kabar baik bahwa ada yang hadir memberinya makan, saat mereka sakit mereka membutuhkan kabar baik bahwa ada yang mengobatinya, saat tertindas ada yang membebaskannya itulah kabar baik bagi mereka. Artinya bahwa cerita tentang Yesus yang inklusif dan berpihak pada orang-orang yang tertindas dan orang - orang lemah, mereka rasakan dalam perbuatan baik gereja kepada mereka, bukan sekadar mendengar kisah-Nya. Misi Yesus mencakup mereka yang miskin dan yang kaya, yang tertindas dan yang menindas, yang berdosa dan yang saleh. Misi-Nya adalah misi yang melenyapkan keterasingan dan menghancurkan tembok-tembok kebencian, misi yang melintasi batas-batas antara individu dan kelompok. Landasan misi Gereja harus selaras dengan semangat Sila Kelima Pancasila yang diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan.

Gereja harus mampu membuat anggaran yang berfokus pada pertumbuhan yang kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas diharapkan anggota jemaat semakin bertambah banyak yang ditandai dengan perluasan wilayah pelayanan, penambahan pos-pos pelayanan, peningkatan fasilitas dan

---

perkembangan bidang pelayanan serta terampil dalam memanfaatkan teknologi. Secara kualitatif diharapkan iman anggota jemaat bertumbuh secara progresif dalam kasih kepada Tuhan, kesatuan yang erat dengan sesama dan memahami Firman Tuhan dengan baik. Dengan pertumbuhan secara kualitas diharapkan pula tercipta kesatuan sesama orang percaya, menerima perbedaan satu dengan yang lain menuju kesempurnaan dan kedewasaan. Karena kedewasaan secara rohani akan menyebabkan tindakan, ucapan dan pemikiran yang ber-asaskan karakter Kristus. Dengan kualitas seperti ini setiap pribadi dalam jemaat akan mampu menangkal ajaran-ajaran yang keliru dan tangguh menghadapi perkembangan globalisasi. Sebagai contoh nyata, Gereja harus memiliki Program-program antara lain: Bantuan untuk Guru Agama Kristen, Perayaan Natal Sekolah Negeri, Bantuan untuk Yayasan-Yayasan Kristen, dan Pembelajaran Diakonia Transformatif. Ada juga Program Diakonia yaitu: Bantuan ke Dalam, Pengobatan dan Perawatan Orang Sakit/Meninggal Dunia dan Bantuan untuk Orang Jompo/Jemaat Tidak Mampu. Bisa juga dalam bidang pendidikan seperti: Pemberian Beasiswa, Kebaktian Paskah dan Perayaan Natal Siswa Penerima Beasiswa dan Program Pelayanan Kasih lainnya seperti: Bantuan Pelayan Firman dan Bantuan Sarana Prasarana Gereja-Gereja Kecil dan Bantuan Bencana Alam.

Permasalahan keadilan sosial ini muncul dikarenakan Gereja masih terjebak dalam sikap eksklusivisme. Gereja masih banyak membeda-bedakan berdasarkan agama. Orang-orang Kristen masih banyak yang membutuhkan bantuan sehingga harus menjadi prioritas sebelum keluar membantu yang lain. 'Kita harus lebih dahulu memperhatikan saudara-saudara seiman' adalah motto yang populer di kalangan jemaat di Gereja. Sikap ini belum sesuai dengan cita-cita sila kelima Pancasila yang mengharapakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berdasarkan Sila Kelima adalah keadilan yang tidak membeda – bedakan agama, suku dan ras. John Titaley, Guru Besar Ilmu Teologi mengungkapkan bahwa eksklusivismelah yang mengakibatkan adanya sikap membeda-bedakan berdasarkan agama. Titaley juga mengatakan bahwa sikap eksklusif bisa menjadi salah satu akar yang dapat menimbulkan berbagai sikap yang tidak toleran sehingga perdamaian antar agama - agama akan sulit tercapai. Titaley mengusulkan agar pemahaman eksklusivisme itu tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Bumi Pancasila, Indonesia. Menurutnya pemahaman tentang Yang Maha Kuasa yang dikenal Bangsa Yahudi dalam budayanya sebagai Yahweh dan Bangsa Indonesia mengenalnya dengan Tuhan Yang Maha Esa harus disadari sudah bekerja dalam sejarah Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dll. Semua agama tersebut mengalami berkat dan rahmat yang sama dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa mendapatkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945.

## **KESIMPULAN**

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita – cita Indonesia merdeka. Demi mewujudkan cita-cita tersebut maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan keadilan sosial sebagai salah satu unsur yang menyusun ideologi negara dalam Pancasila sebagaimana termaktub dalam sila kelima yang berbunyi, 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Selanjutnya hal tersebut diatur secara khusus melalui konstitusi negara dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27-33. Gereja sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia memiliki mimpi yang sama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka tersebut. Gereja harus memaknai dan mengaplikasikan Firman Tuhan dalam Lukas 4:18-19: 'Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang – orang buta, untuk membebaskan orang – orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Gereja zaman sekarang yang katanya bernafaskan keadilan sosial

---

belum sepenuhnya mengaktualisasikan nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Terlihat bahwa Gereja belum bersungguh-sungguh dan serius untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka tersebut. Tampak jelas bahwa program-program baru sebatas bantuan sosial dan belum mengarah pada pemberdayaan ekonomi transformatif (jangka panjang) yang bisa membuat masyarakat berdaya secara ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Gereja yang memiliki semangat misi selaras Sila Kelima Pancasila, seharusnya melepaskan diri dari Eksklusivisme sebagaimana Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 keluar dari eksklusivisme agama dan suku-suku menjadi satu bangsa sederajat dalam keberagaman dengan tidak membeda-bedakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anthony Giddens, Kapitalisme dan teori sosial modern: suatu analisis karya-tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, diterjemahkan oleh Soeheba Kramadibrata, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Barbalet Jack. Weber, Passion and Profits: 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' in Context. (Cambridge: Cambridge University Press. 2008)
- Clemmens Dutt (Ed.), Fundamentals of Marxism – Leninism (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1963)
- Collins, Randall. “The Durkheimian movement in France and in world sociology,” The Cambridge Companion to Durkheim, edited by J.C. Alexander and Philip Smith, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)
- David J Bosch. Transformasi Misi Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997)
- Dunn, Bill, Global Political Economy, A Marxist Critique, (London: Pluto Press. 2009)
- Edmund Woga, CScR. 2002. Dasar – Dasar Misiologi (Yogyakarta: Kanisius, 2002)
- Emile Durkheim, Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan, terj. Lukas Ginting, Jakarta, Erlangga
- I Made Priana. Misi Gereja Kristen di Bali dalam Perspektif Pancasila (Salatiga: Fakultas Teologia Universitas Kristena Satya Wacana, 2017)
- Marx, Capital. A Critique of Political Economy Vol. II, ed. F. Engels (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1961)
- Prof John A. Titaley. Menelusuri Akar – Akar Eksklusivisme Agama Abrahamik, Volume 4 (Semarang: e-Journal Elsa, Januari 2018)
- Yudi Latief. Negara Paripurna (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)
-